



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan upaya membangun sistem manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Disamping itu, penyusunan Indikator Kinerja Utama merupakan upaya untuk menunjukkan arah dan dimensi kebijakan sistem akuntabilitas di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Untuk dapat mengukur tingkat keberhasilan Instansi Pemerintah dalam merealisasikan semua Visi dan Misi yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat kita lihat dengan Indikator Kinerja. Dengan Indikator Kinerja kita dapat mengetahui sejauh mana anggaran yang telah direalisasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran telah mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, dan sudah barang tentu memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat yang kita sebut outcome.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah juga menetapkan suatu Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada fungsi dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung sebagai Instansi yang memiliki tugas dalam bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Dengan demikian diharapkan Indikator Kinerja Utama dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik disamping juga sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama serta menunjukkan target yang harus dicapai berdasarkan menunjukkan target yang harus dicapai berdasarkan tolak ukur yang ditetapkan.

### **1.2 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari Penetapan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung adalah untuk memperoleh gambaran atau alat ukur mengenai



tingkat pencapaian sasaran atau tujuan yang hendak dicapai selain itu juga penetapan IKU merupakan penjabaran dari visi misi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Tujuan dari penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini adalah :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik dan melakukan fungsinya yang berdampak pada pembangunan daerah dan bermanfaat bagi masyarakat sesuai dengan Indikator Kinerja yang ditetapkan;
2. Untuk memperoleh ukuran tingkat keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi sehingga dapat digunakan untuk perbaikan Kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

## BAB II

### PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

#### 2.1 PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta untuk lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, instansi pemerintah perlu menetapkan indikator kinerja utama, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2007 disebut bahwa yang dimaksud dengan Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicators) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Indikator Kinerja Utama ini terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Selain itu Indikator Kinerja Utama dari juga merupakan hal utama yang akan diwujudkan oleh instansi yang bersangkutan, atau untuk mewujudkan untuk apa instansi pemerintah tersebut dibentuk, yang menjadi *core area/business area* dan tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama instansi pemerintah.

Indikator kinerja utama digunakan instansi pemerintah untuk :

- a. Perencanaan Jangka Menengah
- b. Perencanaan Tahunan
- c. Penyusunan dokumen penetapan kinerja
- d. Pelaporan akuntabilitas kinerja
- e. Evaluasi kinerja instansi pemerintah
- f. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

#### 2.2 VISI, MISI DAN TUJUAN

Visi adalah kondisi yang dicita-citakan untuk di wujudkan. Secara *ontologis*, visi merupakan *das sollen*, yaitu apa yang sebenarnya menjadi tujuan atau keinginan yang ideal yang disepakati oleh seluruh stakeholders dan terkristalisasi dalam bentuk jati diri. Pada umumnya visi dibangun untuk mendorong semangat seluruh stakeholders agar dapat berperan serta aktif dalam pembangunan dan sekaligus sebagai inspirasi untuk menggerakkan seluruh kemampuan stakeholders untuk secara bersama dan sinergis membangun daerah.

Dalam dokumen RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2014 – 2019, visi pembangunan Provinsi Lampung adalah :“**LAMPUNG MAJU DAN SEJAHTERA 2019**”. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah



(SKPD) yang menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif harus mendukung terwujudnya visi tersebut.

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Lampung Tahun 2015-2019, dirumuskan 5 (lima) misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan pembangunan ekonomi dan memperkuat kemandirian daerah.
2. Meningkatkan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial.
3. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, iptek dan inovasi, budaya masyarakat, dan kehidupan beragama yang toleran.
4. Meningkatkan pelestarian SDA dan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Menegakkan supremasi hukum, mengembangkan demokrasi berbasis kearifan lokal, dan memantapkan pemerintahan yang baik dan antisipatif.

Sesuai dengan Visi dan Misi Provinsi Lampung, maka Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung akan berpedoman pada Misi ke 1 (satu) dari 5 misi yang telah dijabarkan pada RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015-2019, yaitu Meningkatkan pembangunan ekonomi dan memperkuat kemandirain daerah.

Misi ini adalah upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (*pro growth*) melalui pengembangan potensi dan keunggulan yang dimiliki provinsi Lampung dengan memperkuat investasi (*pro investment*) diberbagai sektor dan ekonomi yang berbasis kerakyatan dengan kemitraan. Pertumbuhan ekonomi yang kuat ditandai juga oleh upaya pemerataan dengan *trickledown effect* yang tinggi.

Upaya memperkuat ekonomi Lampung dengan mengembangkan potensi dan keunggulan yang dimiliki dengan orientasi ekonomi nasional dan global. Ekonomi berbasis agro terus dimantapkan dan diperkuat, kemudian ditransformasikan ke ekonomi berbasis industri, perdagangan, dan jasa berbasis teknologi. Investasi baru (dalam dan luar negeri) harus dipacu untuk memperluas kesempatan kerja. Pembangunan ekonomi dan pemerataannya harus diorientasikan untuk mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menurunkan jumlah penduduk miskin. Pembangunan ekonomi tidak mengeksploitasi sumber daya alam dan tidak merusak lingkungan.

Perkuatan ekonomi merupakan penciptaan daya saing berkelanjutan atau *sustainable competitive advantage* sebagai hasil dari pengelolaan sumber daya didukung kompetensi yang tinggi (*core competence*). Produktivitas barang dan jasa yang dihasilkan dengan kualitas tinggi dan berdaya saing sehingga meningkatkan nilai tambah produk dan kemandirian daerah. Penguatan kemandirian daerah diidentifikasi oleh kapasitas fiskal yang tinggi terutama dicirikan oleh pendapatan asli daerah (PAD) yang tinggi. Dampak



akhir dari pembangunan ekonomi Lampung adalah kesejahteraan sosial yang berkeadilan. Kesejahteraan dicapai melalui pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.

### **2.3 TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif Provinsi Lampung adalah :

1. Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara;
2. Meningkatkan rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara dan nusantara;
3. Meningkatkan rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara dan nusantara;
4. Meningkatkan jumlah pelaksanaan event ekonomi kreatif.

Sasaran dari tujuan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif Provinsi Lampung adalah :

1. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara;
2. Meningkatnya rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara dan nusantara;
3. Meningkatnya rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara dan nusantara;
4. Meningkatnya jumlah pelaksanaan event ekonomi kreatif.

### **2.4 STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Strategi yang harus dijalankan untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan dan mendorong Kabupaten/Kota untuk membangun Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) unggulan, diversifikasi produk pariwisata, serta penunjang yang siap jual sehingga mampu menarik kunjungan wisatawan;
2. Mengembangkan kualitas promosi pariwisata untuk penguatan pemasaran pariwisata daerah;
3. Mempersiapkan SDM sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang mampu memberikan pelayanan dan informasi kepariwisataan bagi wisatawan;
4. Meningkatkan sinergitas dengan para pemangku kepentingan dan mendorong berkembangnya ekonomi kreatif;



5. Melakukan berbagai kerjasama baik dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Pusat, Pihak swasta, maupun luar negeri

Kebijakan yang harus dijalankan untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan produk wisata secara kreatif dan inovatif yang berbasis potensi lokal dengan selalu memperlihatkan terlaksananya pesona pariwisata Lampung;
2. Pengembangan pemasaran pariwisata yang didukung sarana dan fasilitas memadai untuk meningkatkan kunjungan wisatawan;
3. Penyiapan/peningkatan SDM berkualitas yang memiliki tingkat *competitiveness* tinggi pada tataran nasional dan internasional dengan tetap memiliki identitas lokal;
4. Pengembangan ekonomi kreatif melalui upaya pelestarian, pemberdayaan, pengembangan dan pemanfaatan berbasis seni budaya, media, desain, dan iptek;
5. Pengembangan kemitraan pariwisata dan ekonomi kreatif;



### **BAB III**

#### **PENETAPAN INDIKATOR KINEJA UTAMA**

Guna mewujudkan visi dan misinya, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung menetapkan Indikator Kinerja Utama, sebagai berikut :

1. Persentase Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Nusantara;
2. Lama tinggal Wisatawan Mancanegara dan Nusantara;
3. Rata-rata Pengeluaran wisatawan Mancanegara dan Nusantara;
4. Jumlah atraksi produk seni budaya
5. Jumlah produk seni budaya (sanggar)
6. Jumlah pagelaran pertunjukan (Fashion)

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung, Tugas Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan provinsi di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung maka dapat dilakukan upaya penyesuaian yang lebih realistis yang ditetapkan dalam lampiran Indikator Kinerja Utama (IKU).



## **BAB IV PENUTUP**

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung diharapkan dapat dijadikan pedoman atau ukuran kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sehingga dapat dijadikan dasar dalam pembuatan kontrak kinerja yang harus diwujudkan dan juga dapat memberikan informasi mengenai keberhasilan atau kesesuaian kinerja SKPD.

Dengan adanya informasi sebagai hasil dari indikator kinerja yang dibuat, organisasi dapat membuat keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerjanya dimasa yang akan datang.

Besar harapan kami Indikator Kinerja Utama ini dapat dijadikan acuan dalam pembuatan beberapa dokumen dan pelaporan serta untuk menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun tertentu dan dapat juga dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Lampung.

Bandar Lampung, 2015

KEPALA DINAS  
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
PROVINSI LAMPUNG

**HERLINA WARGANEGARA, SE., MM.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19591214 199103 2 002





# **LAMPIRAN**

# **INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

